

JURNAL
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENYALURKAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN KEPADA MASYARAKAT

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
ACHMAD FERRY KUSUMA WARDANA
NIM. 0910110101



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013

LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul Jurnal Ilmiah : KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM MENYALURKAN DANA
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
KEPADA MASYARAKAT**

Identitas Penulis :

a. Nama : Achmad Ferry Kusuma Wardana

b. NIM : 0910110101

Konsentrasi : Hukum Perdata

Jangka Waktu Penelitian : 3 (tiga) bulan

Disetujui pada tanggal : 31 Januari 2013

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto, S.H., M.H

NIP. 19590717 198601 1 001

Budi Santoso, S.H.LLM

NIP. 19720622 200501 1 002

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Siti Hamidah, SH.MM.

NIP. 19660622 199002 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**JURNAL ILMIAH
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYALURKAN
DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN KEPADA
MASYARAKAT**

**Oleh:
ACHMAD FERRY KUSUMA WARDANA
0910110101**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis penguji pada tanggal: 1 Maret 2013
Ketua Majelis Penguji Anggota

Umu Hilmy, S.H.M.H.
NIP. 19490712 198403 2 001

Agus Yulianto, S.H.M.H.
NIP. 19590717 198601 1 001

Anggota

Ketua Bagian Hukum Perdata

Budi Santoso, S.H.LLM.
NIP. 19720622 200501 1 002

Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.
19591216 198503 1 001

ABSTRAKSI

Penulis membahas tentang kewenangan pemerintah daerah dalam menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Penulis mengangkat tema ini dengan landasan bahwa pentingnya kejelasan kewenangan agar kedepannya tidak terjadi ketimpangan dalam menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

Adapun tujuan penulis ialah untuk Untuk menganalisis berwenang tidaknya Pemerintah Daerah dalam menyalurkan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat..Sehingga diharapkan penelitian dan penulisan ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis ini adalah penelitian hukum normatif, karena penulis akan melakukan penelitian dengan menganalisis perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Sedangkan Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konsep.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini ialah bahwa Perda Provinsi Jatim Nomor 4 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak berwenang terkait dengan penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan, karena kewenangan tersebut mutlak terletak pada perusahaan yang mengeluarkan dana CSR nya tersebut. Pihak dari Pemerintah Daerah hanya sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan forum pelaksana TSP serta sebagai penerima laporan dari perusahaan tersebut.

ABSTRACT

The author discusses the authority of local governments to distributing funds to corporate social responsibility to the community. The authors take up this on the grounds that the importance of clarity of authority so that the future does not happen inequality in funds of corporate social responsibility to the community.

The author's purpose is to To analyze whether local government authorities in distributing funds Corporate Social Responsibility to the community .. It is expected that the research and writing can provide benefits both theoretically and practically.

Type of research by the author is normative legal research, because I would do the research by analyzing the laws and regulations in force regarding the authority of local governments to distributing funds to corporate social responsibility to the community. While the approach used is the Statute Approach and Conceptual Approach.

The results of the research that has been conducted by the authors is that the East Java Provincial Regulation No. 4 Year 2011 explained that the Government was not authorized disbursements related to corporate social responsibility, as the absolute authority of the company lies in its CSR spend it. Parties of the Local Government only as a facilitator in the implementation of TSP and implementers forum as a recipient of the report of the company.

KATA KUNCI

1. Kewenangan
2. Pemerintah Daerah
3. Masyarakat
4. Dana
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

PENDAHULUAN

Pada dasarnya tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering disebut CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah sebuah dana hibah dari perusahaan untuk penduduk sekitar, lingkungan dan laba (profit) bagi perusahaan itu sendiri. Karena hal tersebut merupakan salah satu tujuan dari perusahaan yang ada dalam setiap rapat tahunan mereka.

Dalam Undang-undang salah satunya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 yang mengatur tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan yang isinya menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran yang apabila tidak dilakukan akan dikenakan sanksi. CSR ini semakin sering didengar sejak menguatnya keinginan untuk menerapkan *Good Corporate Governance*.

Tanggung jawab perusahaan dapat disebut sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak kegiatan operasinya dalam dimensi ekonomis, sosial dan lingkungan pada masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan demikian tetap menjaga agar dampak-dampak tersebut tetap menyumbang manfaat dan bukan merugikan bagi para *Stakeholdernya*.

Saat ini baru terdapat 4 (empat) aturan hukum yang mewajibkan perusahaan tertentu melaksanakan aktivitas CSR atau tanggungjawab sosial dan lingkungan, diantaranya adalah :¹

Pertama, bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN: Per-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa

¹ Aomsetiadi, 2011, *CSR dan Kepentingan Pemerintah Daerah* (online), www.mmcsr.usakti.org/node/746
(5 Oktober 2012)

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah *program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN*. Sedangkan pada pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah *program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN*. Program Bina Lingkungan, meliputi: *bantuan korban bencana alam; bantuan pendidikan dan/atau pelatihan; bantuan peningkatan kesehatan; bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum; bantuan sarana ibadah; dan bantuan pelestarian alam*.

Kedua, Peraturan bagi Perseroan Terbatas (PT) yang mengelola Sumber Daya Alam (SDA) diwajibkan melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan, karena telah diatur dalam UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007. Dimana dalam pasal 74 diatur bahwa : (1) *Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan*, (2) *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran*, (3) *Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*, (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah*.

Ketiga, bagi penanaman modal, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa "*Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan*". Sanksi-sanksi terhadap badan usaha atau perseorangan yang melanggar peraturan, diatur dalam Pasal 34, yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya, meliputi: (a). *Peringatan tertulis*; (b). *pembatasan kegiatan usaha*; (c). *pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal*; atau (d). *pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal*

Keempat, bagi perusahaan pengelola minyak dan gas bumi, terikat oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 13 ayat 3 (p), menyebutkan bahwa: "*Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu : (p). pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat*". Jadi berdasarkan Undang-undang tersebut, perusahaan yang operasionalnya terkait Minyak dan Gas Bumi baik pengelola eksplorasi maupun distribusi, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat dan menjamin hak-hak masyarakat adat yang berada di sekitar perusahaan.

Jika dilihat dari peraturan diatas, urusan terkait dengan CSR merupakan *domain* pemerintah pusat, karena baik Peraturan Menteri BUMN, Undang-Undang PT, Undang-Undang PMA, Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dibuat oleh DPR bersama Pemerintah Pusat.

Secara teoritis, Pemerintah Daerah mampu meletakkan prioritas untuk mensinergikan program pengembangan dan program-program CSR perusahaan. Pemerintah Daerah (PEMDA) menghimbau perusahaan untuk memberikan dana CSR-nya untuk dimasukkan dalam APBD. Hal tersebut bertentangan dengan hakekat CSR. Sebab, CSR adalah salah satu kebijakan perusahaan untuk meningkatkan reputasi perusahaan dan memberiikan kembali (*give back*) kepada masyarakat dari keuntungan yang diperoleh perusahaan. Caranya dengan membangun infrastruktur seperti membangun sekolah, membangun jalan, serta menyalurkan dana kemitraan dengan bunga rendah, maupun memberi pendampingan untuk *give-back* tersebut.

Prioritas dan sasaran utama CSR adalah untuk pemangku kepentingan yang sah (*legitimate stakeholders*). Mereka yang mengetahui dan berinteraksi langsung dengan perusahaan melalui kegiatan CSR akan merasa lebih dekat dengan perusahaan dan berterima kasih. Bentuk rasa terima kasih bisa dalam bentuk tidak bertentangan dengan jalannya operasi perusahaan, menceritakan kepada orang lain atas pengalaman menyenangkan yang mereka alami, bahkan

menjadi pelanggan setia. Dengan demikian CSR harus ada pengembalian bagi perusahaan.

Sebagai contoh di daerah Provinsi Jawa Timur, Perusahaan-perusahaan yang terdapat di daerah Provinsi Jawa Timur juga akan lebih dipertegas akan kewajibannya dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan di sekitar perusahaan-perusahaan tersebut. Hal ini diikuti setelah diterbitkannya peraturan daerah yang mengatur tentang hal tersebut di daerah Jawa Timur.

Peraturan Daerah yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan di daerah Jawa Timur tersebut adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Hal ini diperjelas dengan adanya petunjuk pelaksana terhadap peraturan tersebut, yakni terdapat dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012.

Dengan disahkannya peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya tersebut, diharapkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan yang menurut undang-undang atau peraturan lainnya diwajibkan mengeluarkan dana sosial dan lingkungan. Hal tersebut berguna bagi masyarakat atau daerah yang memang benar-benar membutuhkan dana dari perusahaan-perusahaan tersebut. Dapat diambil contoh yakni Perusahaan air minum PT Tirta Investama yang berada di Kabupaten Pasuruan yang dikenal dengan produknya yakni Aqua, Pocari sweat, dan lain sebagainya itu pasti akan terkena dampak dari Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 karena perusahaan tersebut terdapat dalam lingkup wilayah Provinsi Jawa Timur.

Dilihat dari keterangan diatas, hakekat dasar dari tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) adalah berasal dari perusahaan itu sendiri seperti yang dicontohkan di daerah provinsi Jawa Timur tadi. Setelah mengetahui hal tersebut timbul permasalahan, memang pembuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang CSR seperti UU tentang BUMN, UU PT, UU penanaman modal, dan UU minyak dan gas adalah pemerintah pusat yakni DPR bersama dengan presiden. Akan tetapi muncul polemik ketika pelaksanaan kewajiban perusahaan memberikan dana CSR tersebut di daerah-

daerah. Polemik tersebut muncul ketika penyaluran dana CSR yang berasal dari perusahaan-perusahaan di daerah adalah pemerintah daerah atau tidak. Hal ini memunculkan konflik kewenangan antara pemerintah daerah sebagai pemimpin pemerintahan di daerah dengan perusahaan-perusahaan di daerah itu sendiri yang dalam hal ini adalah pemberi dana CSR.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

Apakah Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat?

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian :

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah hukum secara normatif yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap norma-norma yang ada dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²

B. Pendekatan Penelitian :

Metode Pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan penelitian hukum normatif atau Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif ialah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.³ Penelitian Yuridis Normatif dapat juga dikatakan sebagai suatu studi kepustakaan karena yang diteliti dan dikaji adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat serta literatur – literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Metode pendekatan yang digunakan meliputi *Conceptual Approach* atau pendekatan konseptual adalah beranjak dari pandangan atau doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide – ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep – konsep hukum dan asas – asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁴ Kemudian menggunakan *Statute approach* atau pendekatan undang – undang ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵

² Mukti Fajar dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2010, halaman. 34

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, Halaman 13.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2005, Halaman 95.

⁵ *Ibid*, Halaman 93.

C. Bahan Hukum :

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autortif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dalam karya tulis ini meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Umum Milik Negara
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
8. Peraturan Menteri Negara BUMN: Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum),

pandangan para ahli hukum (doktrin), penjelasan peraturan perundang-undangan yang terkait, kasus-kasus hukum terkait dengan pembahasan mengenai pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dana tanggung jawab sosial perusahaan.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia⁶, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum :

Bahan hukum primer dikumpulkan dengan melakukan penelusuran berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Bahan hukum primer ini didapat dari akses internet melalui berbagai situs ilmu hukum dan ilmu ekonomi maupun diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan atau literatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dengan teknik mengutip, baik secara langsung maupun dengan mengutip ide, atau gagasan yang terdapat dalam sumber aslinya. Selain itu juga memakai teknik mengakses dan meng*copy* atau menyalin dari internet artikel-artikel ataupun jurnal-jurnal hukum *online* yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.⁷

E. Teknik Analisa Bahan Hukum :

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam

⁶ Ibid, hal. 392

⁷ Ibid, hal. 392

hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, dan dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.⁸ Disamping itu juga harus dilihat bahwa hubungan itu tidak bersifat teknis, melainkan juga harus dilihat asas yang melandasinya.

Berdasarkan metode interpretasi sosiologis, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Umum Milik Negara, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Negara BUMN: Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan peraturan hukum yang lain perlu ditelaah lebih dalam. Metode Interpretasi secara Teleologis atau Sosiologis yaitu cara penafsiran suatu ketentuan undang-undang untuk mengetahui makna atau yang didasarkan pada tujuan kemasyarakatan. Metode interpretasi undang-undang diterapkan pada suatu undang-undang yang masih berlaku tetapi kurang berfungsi karena tidak sesuai lagi dengan keadaan jaman. Terhadap undang-undang yang ada diupayakan (melalui penafsiran) untuk dapat digunakan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan lingkungan masa kini dengan tidak memperhatikan apakah itu pada saat diundangkannya sudah dikenal atau tidak. Dengan lebih sederhana pengertian metode interpretasi teleologis

⁸ Mukti Fajar, Op. Cit, hal. 181

atau sosiologis dapat dikemukakan yaitu merupakan upaya menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Keadaan undang-undang yang sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan zaman dijadikan alat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada saat sekarang.⁹

⁹ Prima Jayatri, 2011, *Jenis-Jenis Metode Dan Konstruksi Hukum* (online), logikahukum.wordpress.com/tag/prima-jayatri/ (7 November 2012)

PEMBAHASAN

A. Analisis Keberadaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia Kaitannya dengan Wewenang Pemerintah Daerah

Penolakan Perusahaan Terhadap Kewajiban UU Perseroan Terbatas Pasal 74 tentang *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan), dengan konsep pemikiran yang mengkaitkan tentang penolakan kepentingan dunia usaha dengan kewajiban tanggung jawab sosialnya secara langsung. Jika perusahaan yang pendekatannya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dan diminta untuk memberikan kontribusi secara langsung demi kesejahteraan sosial (*public well being*), atau pengertian lainya kegiatan CSR yang sebelumnya adalah bersifat sukarela (*voluntary*), dan perkembangan kini bersifat menjadi suatu kewajiban yang mengikat.¹⁰

Argumen pihak yang mewajibkan, yaitu merupakan suatu konsep yang berarti program CSR harus untuk dilaksanakan kewajibannya (*mandatory*). Sebaliknya, pihak-pihak menyatakan tanggung jawab pelaksanaan CSR tersebut hanya sebagai kegiatan sukarela (*voluntary*) yang sebetulnya adalah *contradictio in-terminis* atau merupakan pertentangan.¹¹

Menurut pengamatan peneliti, tidak semua pelaku bisnis menolak ketentuan pada Undang-undang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan perseroan menyisihkan sebagian laba bersih untuk pelaksanaan CSR. Seperti contoh perusahaan air minum terkemuka di Indonesia saat ini, yaitu PT Tirta Investama (Aqua Danone), Tbk.

Peran pemerintah daerah adalah melakukan monitoring dengan perangkat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial (Amdalsos) dan mengkaji sejauh mana perusahaan mampu memberikan manfaatnya kepada *stakeholder* dalam hal ini masyarakat setempat. Pemda tidak berkewenangan dalam mengatur CSR yang merupakan urusan program

¹⁰ Roslan, Rusady, 2009, Penolakan MK terhadap Judicial Review Pasal 74 UU CSR Berdampak Positif (online), <http://rosadyruslan-humas.blogspot.com/2009/04/penolakan-mk-terhadap-uji-material-uu.html> . (15 Januari 2013)

¹¹ Ibid

perusahaan terlebih masalah pengelolaan dananya, kecuali menjalin kerjasama antar *stakeholder* didasarkan pada program dan skala prioritas yang sama terkait upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat.

Bahwa teori tanggung jawab sosial lahir karena tuntutan dari tanggung jawab itu sendiri. Tanggung jawab sosial berada pada ranah moral, sehingga posisinya tidak sama dengan hukum. Moral dalam tanggung jawab sosial lebih mengarah pada tindakan lahiriah yang didasarkan sepenuhnya dari sikap batiniah, sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih. Sedangkan tanggung jawab hukum lebih menekankan pada kesesuaian sikap lahiriah dengan aturan, meskipun tindakan tersebut secara obyektif tidak salah, barangkali baik dan sesuai dengan pandangan moral, hukum dan kesesuaian saja tidak bisak dijadikan dasar untuk menarik suatu kesimpulan karena tidak tahu motivasi atau maksud yang mendasarinya.¹²

Dengan demikian konsep tanggung jawab sosial lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan tersebut melakukan aktivitas usahanya. Secara negatif hal ini bermakna bahwa perusahaan harus menjalankan aktivitas usahanya sedemikian rupa, sehingga tidak berdampak negatif pada pihak-pihak tertentu dalam masyarakat. Sedangkan secara positif hal ini mengandung makna bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatannya sedemikian rupa, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

B. Analisis Tentang Wewenang Pemerintah Daerah Terkait Dana CSR dari Perusahaan

Perkembangan wewenang pemerintah dipengaruhi oleh karakteristik tugas yang dibebankan kepadanya. Tugas pemerintah adalah mengikuti tugas negara,

¹² Franz Magnis Suseno, *Etika dasar : Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, Hal. 57-58.

yaitu menyelenggarakan sebagian dari tugas negara sebagai organisasi kekuasaan.¹³

Untuk memutar roda pemerintahan “kekuasaan” dan “wewenang” adalah dianggap penting. Dalam ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi istilah “kekuasaan” dan “wewenang” terkait erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Menurut pengertian umum atau bahasa, kata “kekuasaan” berasal dari “kuasa” artinya kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu); kekuatan.¹⁴ Sedangkan wewenang adalah (1) hak dan kekuasaan untuk bertindak atau melakukan sesuatu; (2) kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.¹⁵

Soerjono Soekanto mengemukakan pengertian “kekuasaan” sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pemegang kekuasaan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antara penguasa dan yang dikuasai, atau dengan kata lain antara pihak yang memiliki kemampuan melancarkan pengaruh dan pihak lain menerima pengaruh itu dengan rela atau karena terpaksa. Beda antara kekuasaan dan wewenang adalah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau kelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.¹⁶

Menurut Bagir Manan, kekuasaan tidak sama artinya dengan wewenang. Kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, wewenang berarti hak dan sekaligus kewajiban (*rechten en plighden*).¹⁷

Sebagai contoh otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna

¹³ Lukman Hakim, Op. Cit. Hal.115

¹⁴ Anton M. Moeliono, dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, Hal.553

¹⁵ Ibid.Hal.1128

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, Hal.79-80

¹⁷ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kotadalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 13 Mei 2000, Hal. 1-2.

menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD). Substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁸

Perda adalah produk hukum dari kepala daerah. salah satu produk hukum yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Sesuai dengan yang telah dijelaskan di sub bab 4.1 diatas, peneliti memakai contoh perusahaan air minum terkemuka di Indonesia yakni PT. Tirta Investama (Aqua Danone) Tbk.

Peneliti menggunakan teori kewenangan atribusi, yaitu wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara. Atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan daerah provinsi jawa timur nomor 4 Tahun 2011 yang terdapat pada pasal 15 dan 16 yang menjelaskan tentang kewenangan pemerintah daerah terkait tanggung jawab sosial perusahaan (TSP) dari perusahaan tersebut.

Corporate social responsibility (CSR) diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Diantaranya adalah undang-undang nomor 40 Tahun 2007, undang-undang nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, undang-undang nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara, peraturan daerah provinsi jawa timur nomor 4 Tahun 2011 tentang tanggung jawab sosial perusahaan.

¹⁸ Lukman Hakim, *Op. Cit.* Hal.37.

Dalam prakteknya, pihak pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana CSR kedalam anggaran APBD. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri ketika dana anggaran perusahaan yang berupa dana CSR tersebut disalurkan ke masyarakat di daerah-daerah. hal ini menjadi suatu kelemahan dalam hal penyaluran dana CSR yang berasal dari perusahaan.

Jika dihubungkan dengan pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 dengan PT. Tirta Investama (Aqua Danone) Tbk adalah letak dari perusahaan tersebut berada di daerah Pandaan, Kabupaten Pasuruan yang merupakan lingkup wilayah Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, PT.Tirta Investama (Aqua Danone) Tbk harus tunduk dengan Perda Prov.Jatim Nomor 4 Tahun 2011 tersebut.

Didalam pasal 2 dijelaskan bahwa tujuan dari peraturan daerah ini adalah :

- a. Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan di Jawa Timur; dan
- b. Memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Jawa Timur dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional.

Didalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 dijelaskan bahwa “bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya”. Yang dimaksud dengan TSP adalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau yang sering disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Dalam hal pelaksanaannya, pihak perusahaan yang berhak melaksanakan program-program TSP dengan kata lain perusahaan berhak menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (TSP) kepada masyarakat melalui forum pelaksana TSP yang dibentuk sendiri oleh perusahaan. Hal ini telah diatur didalam Pasal 9 ayat (1) Perda Provinsi Jatim Nomor 4 Tahun 2011.

Dijelaskan juga terkait kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal TSP (tanggung jawab sosial perusahaan) pada pasal 5 ayat (3) yaitu Forum Pelaksana TSP dalam melaksanakan program TSP menghimpun dan memverifikasi usulan rencana kegiatan dari masing-masing anggota forum untuk disinergikan dengan program Pemerintah Daerah Provinsi. Dalam ayat (4) dan (5) dijelaskan bahwa Forum pelaksana TSP menunjuk salah satu anggota sebagai koordinator Forum Pelaksana TSP. Forum pelaksana melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan program TSP kepada koordinator FP-TSP. Didalam ayat (6) dijelaskan bahwa Koordinator Forum Pelaksana TSP melaporkan kegiatan program TSP di masing-masing Forum Pelaksana TSP kepada Pemerintah Daerah Provinsi sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun.

Dijelaskan juga terkait kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan adalah terdapat pada pasal 9 yaitu Tim Fasilitasi TSP melaporkan pelaksanaan program TSP di Jawa Timur kepada Gubernur. Pelaporan tersebut meliputi :

- a. Realisasi pelaksanaan penyelenggaraan program TSP; dan
- b. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya

Setelah itu Gubernur melaporkan kegiatan pelaksanaan program TSP kepada DPRD Provinsi Jawa Timur.

Jadi yang menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) kepada masyarakat adalah perusahaan penyelenggara *corporate social responsibility* itu sendiri, bukan pemerintah daerah. pemerintah daerah sebagai fasilitator atas pembentukan forum penyelenggara TSP yang terdiri dari berbagai perusahaan serta sebagai penerima laporan terkait realisasi pelaksanaan penyelenggaraan program TSP dan pelaporan atas permasalahan yang dihadapi dan memberikan solusi dan upaya pemecahan dari permasalahan tersebut.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Pemerintah Daerah tidak berwenang terkait dengan penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan, karena kewenangan tersebut mutlak terletak pada perusahaan yang mengeluarkan dana CSR nya tersebut. Pihak dari Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dalam memfasilitasi terbentuknya forum dalam penyelenggaraan TSP serta sebagai penerima laporan terkait realisasi pelaksanaan penyelenggaraan program TSP dan pelaporan atas permasalahan yang dihadapi dan memberikan solusi dan upaya pemecahan dari permasalahan tersebut.
2. Peran Pemerintah Daerah adalah melakukan monitoring dengan perangkat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial (Amdalsos) dan mengkaji sejauh mana perusahaan mampu memberikan manfaatnya kepada *stakeholder* dalam hal ini masyarakat setempat. Pemda tidak berkewenangan dalam menyalurkan dana CSR yang merupakan urusan program perusahaan terlebih masalah pengelolaan dananya, kecuali menjalin kerjasama antar *stakeholder* didasarkan pada program dan skala prioritas yang sama terkait upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat.
3. Dalam hal pelaksanaannya, pihak perusahaan yang berhak melaksanakan program-program TSP dengan kata lain perusahaan berhak menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (TSP) kepada masyarakat melalui forum pelaksana TSP yang dibentuk sendiri oleh perusahaan. Hal ini telah diatur didalam Pasal 9 ayat (1) Perda Provinsi Jatim Nomor 4 Tahun 2011.

SARAN

Dari hasil kesimpulan pembahasan diatas, maka ada beberapa saran yang penulis rekomendasikan yakni sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Pemerintah dalam menyusun Peraturan Pemerintah mengenai CSR harus lebih bijaksana misalnya dengan adanya insentif pajak, bagi perusahaan yang mengimplementasikan CSR.

2. Diharapkan kepada perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan program CSR, diharapkan untuk segera melaksanakan program CSR tersebut supaya terlaksana tujuan dari CSR yaitu terselenggaranya program pembangunan dalam pemerintahan di daerah.
3. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk memperhatikan peraturan perundang-undangan terutama pada peraturan daerah provinsi jawa timur nomor 4 tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya pada peraturan gubernur jawa timur nomor 52 tahun 2012 tentang pengaturan dari tanggung jawab sosial perusahaan di daerah khususnya daerah provinsi jawa timur, supaya dapat terciptanya keharmonisan dan kesesuaian antara wewenang pemerintah dan perusahaan selaku pemberi dana *corporate social responsibility* (CSR).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Agustina, Rosa, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, UI Press, Jakarta
- Alijoyo, Antonius, 2007, *Etika Bisnis Dalam Corporate Code of Conduct*, Grafika Utama, Jakarta
- Azhary, 1995, *Negara*, UI Press, Jakarta
- Budi Untung, Hendrik, 2008, *Corporate Social Responsibility*, PT. Sinar Grafika, Jogjakarta
- Budiardjo, Miriam, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Cannon, Tom, 1992, *Corporate Responsibility. Terjemahan*, Elex Media Omputindo, Jakarta
- Deliar, Noer, 1983, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Rajawali, Jakarta
- Djosoetono, 1982, *Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Fajar, Mukti dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta
- Hakim, Lukman, 2011, *Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang
- Hutabarat, H. Martin, 1996, *Hukum dan Politik Indonesia, Tinjauan Analisis dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Ibrahim, Johnny, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang
- Indrohartono, 1993, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta
- Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah : Pasang surut Hubungan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung
- Kansil, C.S.T, 2003, *Hukum Antar Tata Pemerintahan*, Airlangga, Jakarta
- Kantaatmadja, Komar, 1981, *Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak Di Laut*, Alumni, Bandung
- Keraf, A. Sonny, 1998, *Etika Bisnis : Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta
- Khairandy, Ridwan, 2006, *Pengantar Hukum Dagang*, UII Press, Yogyakarta

- Mayo, B. Hendry, 1960, *An introduction to Democratic Theory*, Oxford University Press, New York
- Moeliono, Anton M. dkk, 1995, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Poerwanto, 2010, *Corporate Social Responsibility : Menjinakkan Gejolak Sosial di Era Pornografi*, Pustaka Pelajar, Jember
- Salam, Baharuddin, 1997, *Etika Moral, Asas Moral dalam Kehidupan Sosial Manusia*, Renika Cipta, Jakarta
- Sentosa, Mas Achmad, 2001, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta
- Situmorang, Sodjuangon, 2002, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/kota*, UI Press, Jakarta
- Soedjito, Irawan, 1981, *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, Bina Aksara, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1998, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Soemantri, Sri, 1979, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung
- Soemantri, Sri, 1979, *Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung
- Sunarno, Siswanto, 2005, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Makasar
- Sunny, Ismail. 1978, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Varuna, Jakarta
- Suseno, Franz Magnis, 1998, *Etika dasar : Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta
- Tabrani, Machsun, 2006, *Pertanggungjawaban Direksi Setelah Perseroan Pailit*, UII Press, Yogyakarta
- Wahyudi, Isa, 2008, *Corporate Social Responsibility*, INSPIRE, Malang
- Widjaya, I.G Rai, 2006, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan di bidang usaha*, cet G, kesaint Bianc, Jakarta
- Wiradipradja, E. Saifullah, 1989, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Pengangkutan Udara Internasional*, Liberty, Yogyakarta
- Y.W Sunindhia,S.H. 1987, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*, Bina Aksara, Jakarta

Skripsi

Venny Alita Andrawina, 2011, *Pelaksanaan Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terkait Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR)*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Umum Milik Negara

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Peraturan Menteri Negara BUMN: Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011

Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Internet

Aomsetiadi, 23 Desember 2011, **CSR dan Kepentingan Pemerintah Daerah**

<http://logikahukum.wordpress.com/tag/metode-interpretasi-secara-teleologis-atau-sosiologis/> Diakses tanggal 7 November 2012

Baswir, Revrison, 2004, **Etika Bisnis**, www.republika.com, Diakses tanggal 12 Desember 2012

Hanto, Ambrosius. 5 Agustus 2007. **CSR Agar Semua Senang**, Kompas, Diakses tanggal 9 Oktober 2012

- Jayatri, Prima, 2011, **Jenis-Jenis Metode Dan Konstruksi Hukum**, logikahukum.wordpress.com/tag/prima-jayatri/ Diakses tanggal 7 November 2012
- Maharani, Restuning, 2009, **Teori Kewenangan**, restuningmaharani.blogspot.com/2009/10/teori-kewenangan.html Diakses tanggal 17 November 2012
- Molekandella Boer, Kheyene, 2011, **Kesuksesan CSR Aqua Danone**, <http://komunikasia.net/riset/kesuksesan-csr-aqua-danone>, Diakses tanggal 15 Januari 2013
- Radyati, Maria R. Nindita. 2009. **Intervensi Pemerintah Daerah Dalam CSR** <http://www.mmcsrusakti.org/node/746> Diakses tanggal 9 Oktober 2012
- Roslan, Rusady, 2009, **Penolakan MK terhadap Judicial Review Pasal 74 UU CSR Berdampak Positif**, <http://rosadyruslan-humas.blogspot.com/2009/04/penolakan-mk-terhadap-uji-material-uu.html> Diakses tanggal 15 Januari 2013
- Suhandiri, Putri M. 2007, **Schema CSR**, www.kompas.com Diakses tanggal 28 November 2012
- Wuryanta, AG. Eka Wenats, 2009, *Four Theorie Of The Press*, <http://filsafat-eka-wenats.blogspot.com> Diakses tanggal 20 Desember 2012